

PENILAIAN KAPASITAS PENERIMA PINJAMAN USAHA MIKRO DARI PSE KEUSKUPAN SURABAYA

Lilik Indrawati*

lilik.indrawati.2013@gmail.com

Abstract

In Indonesian economic development, micro, small and medium enterprise are described as sectors having important roles since the majority of Indonesian population belong to the low-educated group and live on small scale enterprise both in traditional and modern ones. Micro, small and medium enterprise exist as one of the solutions to the sound economic system. These enterprises are the ones which are not affected by the economic crisis and the global economic crisis. Looking at this facts, these two enterprises should be taken into account by the government in the economic development. The micro, small and medium enterprise get the capital from the bank, both government and private bank. So is the one organized by Surabaya Diosis via the Comission of social and economic development for the members and public. This article is aimed at evaluating the the capacity of the micro loan reveiver from the Comission of social and economic development.

Keywords: *micro, small, and medium enterprises.*

Pendahuluan

Pada pascakrisis tahun 1997 di Indonesia, UMKM dapat membuktikan bahwa sektor ini dapat menjadi tumpuan bagi perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan UMKM mampu bertahan dibandingkan dengan usaha besar lainnya yang cenderung mengalami keterpurukan. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah UMKM setiap tahunnya. Usaha skala kecil dan menengah (UMKM) di negara berkembang hampir selalu merupakan kegiatan ekonomi yang terbesar dalam

jumlah dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Begitu pula dengan kondisi yang ada di Indonesia, meskipun dalam ukuran sumbangan terhadap PDB belum cukup tinggi, sektor ini dapat tetap menjadi tumpuan bagi stabilitas ekonomi nasional. Sehingga perannya diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia.

Sektor UMKM mempunyai peran yang sangat strategis bagi pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Hafsah, 2004). Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM, pada

* Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya.

tahun 2009 jumlah populasi UMKM telah mencapai 48,9 juta unit usaha. Sementara itu, jumlah tenaga kerjanya mencapai 91,8 juta orang (BPS, 2009). Bahkan, berdasarkan survei HSBC pada 2009 lalu, di tengah krisis finansial, sektor UMKM justru mencatat pertumbuhan yang baik. Dalam survei tersebut dinyatakan bahwa indeks kepercayaan UMKM di Indonesia masih di atas rata-rata. Indeks kepercayaan sektor ini masih berada di angka 101 poin atau satu tingkat di atas indeks netral sebesar 100 poin. Hal ini membuat UMKM menjadi level usaha yang paling banyak mendominasi dunia usaha di Indonesia, dan semakin mengukuhkan kekuatannya terhadap krisis. Di balik kontribusi UMKM yang cukup baik terhadap perekonomian nasional, ternyata sektor ini masih menyimpan segudang permasalahan yang sangat mendasar. UMKM masih lemah dalam kemampuan manajemen usaha, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas, serta lemahnya akses ke lembaga keuangan, khususnya perbankan (Adiningsih, 2001). Pernyataan ini mendukung penelitian terdahulu oleh Urata (2000) yang mengatakan bahwa di antara permasalahan pokok yang dihadapi oleh UMKM adalah banyaknya UMKM yang belum *bankable*, baik disebabkan oleh belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial.

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) membawa harapan besar dan beban yang besar dalam evolusi semua ekonomi transisi. Pertumbuhan yang berkelanjutan dan sehat dari sektor ini jelas diperlukan, karena sulit untuk membayangkan naiknya standar hidup dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan tanpa adanya pengembangan di sektor ini (McIntyre, 2001). Ayygari *et al.* (2003) menyatakan bahwa Bank Dunia berkomitmen untuk mengembangkan sektor usaha kecil dan menengah sebagai elemen dasar dalam strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Pada saat krisis ekonomi tahun 1998, saat Indonesia

terpaksa harus memanggil *International Monetary Fund* (IMF) untuk membantu pemulihan ekonomi nasional yang sempat jatuh ke titik terendah, hanya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tahan banting dan tidak terpengaruh badai krisis saat itu.

Menurut SMRJ (2008), pada tahun 2006 di Indonesia ada 48,9 juta perusahaan kecil dan menengah yang mempekerjakan 85,4 juta orang (96,2% dari total jumlah pekerja) dan memberikan kontribusi 53,3% terhadap GDP (*Gross Domestic Product*). Data di atas jelas menunjukkan bahwa sektor UMKM di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan perekonomian nasional. Oleh karenanya Indonesia sebagai salah satu negara yang ekonominya masih dalam tahap transisi harus terus mengembangkan sektor UMKM dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional, memperluas kesempatan kerja, dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Batasan UMKM

Definisi UMKM umumnya diberikan dalam bentuk pemberian kriteria atau batasan usaha yang digolongkan sebagai UMKM. Banyak pendapat mengenai kriteria untuk menentukan UMKM. Menurut Ayyagari (2003), istilah *Small Medium Enterprise* (SME) mencakup suatu definisi dan ukuran yang luas, bervariasi dari satu negara ke negara yang lain. Beberapa yang umum digunakan sebagai kriteria adalah jumlah pekerja, total nilai aset bersih, level penjualan, dan investasi. OECD (2004a) menyatakan karena kemudahan, variabel yang paling banyak digunakan adalah jumlah pekerja. Negara-negara Uni Eropa, sebagian besar negara anggota OECD, negara-negara transisi dan berkembang menentukan batas atas jumlah pekerja untuk SME antara 200 – 250 orang, dengan sedikit pengecualian untuk Jepang 300 orang dan Amerika Serikat 500 orang. Berry (2007) menyatakan untuk mendefinisikan SME kebanyakan digunakan kriteria jumlah pekerja dengan jumlah limit

bawah biasanya 5 – 10 orang dan limit atas biasanya 100 – 200 orang.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut: (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau

Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan batasan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja, yaitu untuk industri rumah tangga memiliki jumlah tenaga kerja 1

Tabel 1. Jumlah UMKM dan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur Hingga Juni 2014

No	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH		No	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH	
		UMKM	TENAGA KERJA			UMKM	TENAGA KERJA
1	PACITAN	181.115	221.784	20	MAGETAN	154.800	233.043
2	PONOROGO	207.561	306.487	21	NGAWI	185.312	309.653
3	TRENGGALEK	143.455	194.016	22	BOJONEGORO	281.967	471.481
4	TULUNGAGUNG	181.409	280.424	23	TUBAN	223.998	370.537
5	BLITAR	255.622	406.719	24	LAMONGAN	252.734	421.825
6	KEDIRI	251.493	395.355	25	GRESIK	168.393	239.182
7	MALANG	414.516	826.375	26	BANGKALAN	166.768	210.003
8	LUMAJANG	196.446	287.251	27	SAMPANG	195.215	264.569
9	JEMBER	424.151	729.962	28	PAMEKASAN	195.554	257.481
10	BANYUWANGI	296.706	501.379	29	SUMENEP	269.005	486.196
11	BONDOWOSO	172.378	277.434	30	KOTA KEDIRI	29.306	51.039
12	SITUBONDO	156.727	263.547	31	KOTA BLITAR	21.291	35.439
13	PROBOLINGGO	235.286	397.327	32	KOTA MALANG	77.778	141.906
14	PASURUAN	248.802	403.965	33	KOTA PROBOLINGGO	26.125	41.120
15	SIDOARJO	171.264	306.481	34	KOTA PASURUAN	24.257	44.520
16	MOJOKERTO	155.410	262.651	35	KOTA MOJOKERTO	17.480	31.212
17	JOMBANG	188.614	328.380	36	KOTA MADIUN	22.662	41.557
18	NGANJUK	201.463	322.229	37	KOTA SURABA-YA	260.762	466.779
19	MADIUN	146.562	242.654	38	KOTA BATU	23.544	45.477
JAWA TIMUR				6.825.931		11.117.439	

Sumber: DISKOPUMKM Provinsi Jawa Timur.

sampai 4 orang, usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.

Karakteristik UMKM

Menurut Tambunan (2009: 2), ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia, yaitu:

1. UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar;
2. tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu;
3. sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar;
4. UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.

Peranan UMKM di Bidang Sosial

Sulistyastuti (2004) berpendapat bahwa UMKM mampu memberikan manfaat sosial yaitu mereduksi ketimpangan pendapatan, terutama di negara-negara berkembang. Peranan usaha kecil tidak hanya menyediakan barang-barang dan jasa bagi konsumen yang berdaya beli rendah, tetapi juga bagi konsumen perkotaan lain yang berdaya beli lebih tinggi. Selain itu, usaha kecil juga menyediakan bahan baku atau jasa bagi usaha menengah dan besar, termasuk pemerintah lokal. Tujuan sosial dari UMKM adalah untuk mencapai tingkat kesejahteraan minimum, yaitu menjamin kebutuhan dasar rakyat. Menurut Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) usaha mikro adalah usaha yang memiliki kurang dari 5 orang tenaga kerja.

Kegiatan Konkret Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (Komisi PSE)

Berdasarkan panduan Komisi PSE (2011) Pengembangan Sosial Ekonomi adalah perangkat pastoral Keuskupan yang melaksanakan tugas menjalin komunikasi

dan koordinasi dengan semua pihak terkait, demi terlaksananya Arah Dasar Keuskupan dalam bidang pengembangan sosial ekonomi, sehingga umat memahami, menyadari, dan melaksanakan peran aktif mengembangkan pelayanan sosial yang memberdayakan demi mewujudkan kesejahteraan bersama.

Komisi PSE mengelola kepengurusan, dana dan program, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas komisi kepada Vikjen. Prioritas program komisi PSE yang perlu dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan konkret dan nilai hidup, yang menjadi motivasi berkegiatan yaitu:

1. Pengembangan kesadaran dan partisipasi umat dalam upaya pemberdayaan kewirausahaan bagi petani dan kaum muda. Maksudnya, proses terus-menerus dan harus segera dimulai dalam mengembangkan kesadaran dimensi sosial iman umat dan kesediaan berpartisipasi dalam upaya membantu memberdayakan kemauan untuk mandiri guna meningkatkan mutu kehidupan petani dan kaum muda terutama segi ekonominya.
2. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro (*Credit Union*). Maksudnya, proses terus-menerus dan harus segera dimulai dalam upaya membantu memberdayakan Lembaga Keuangan Mikro (*Credit Union*) guna meningkatkan mutu kehidupan ekonominya. Nilai yang dihayati yakni saling percaya (*trust*). Maksudnya, terus-menerus membina semangat untuk saling percaya (*trust*) sebagai kunci utamanya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini kualitatif karena bertujuan untuk memberikan evaluasi dan masukan bagi Komisi PSE tentang penilaian Kapasitas Penerimaan Pinjaman Usaha Mikro. Rumusan masalah yang dihadapi adalah "Apakah penilaian Kapasitas Penerimaan Pinjaman Usaha Mikro sudah sesuai prosedur yang ada pada Komisi PSE KEUSKUPAN Surabaya?"

Pengumpulan data meliputi pengamatan dan wawancara langsung dengan masyarakat yang pernah mendapat pinjaman dana PSE KEUSKUPAN Surabaya dan pengurus di tiga daerah, yaitu: Wlingi, Resapombo, dan

Nganjuk. Terdapat total 13 pengurus dari tiga daerah tersebut. Dari Wlingi dan Resapombo dihadirkan 7 orang pengurus dan di Nganjuk dihadirkan 6 orang pengurus. Pelaksanaan pada tanggal 1 Maret dan 8 Maret 2015.

Hasil Penelitian

Data yang didapatkan dari hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Penilaian Kapasitas Penerima Pinjaman Usaha Mikro

SCORE	Keterangan
1= Kurang	Perlu diadakan dan/atau diperbaiki secara segera dan menyeluruh
2= Cukup	Perlu dilakukan perbaikan dalam aspek-aspek tertentu saja dan pada waktu yang tepat
3= Baik	Perlu dilakukan optimalisasi dalam penerapannya
4= Baik sekali	Perlu dipertahankan tingkat efektivitas penerapannya

A. KELEMBAGAAN SIE SOSIAL					
1. VISI dan MISI		1	2	3	4
a	Visi dan misi tertulis dengan jelas dan dipahami dengan baik oleh semua perangkat Sie Sosial	0	0	0	13
b	Memiliki rencana dan strategi yang jelas dan dapat diterapkan oleh semua perangkat Sie Sosial untuk mencapai Visi dan Misi	0	13	0	0
		0	13x3 =39	0	13x1=13
	BOBOT=(39+13) :(13+13)=52:26= 2	C= CUKUP			
Jawab:	Ada tetapi belum dirumuskan				
2. Struktur Sie Sosial					
a	Struktur lembaga disusun dengan lengkap dan jelas (Pengurus, Pengawas, dan Pengelola)	0	0	0	13
b	Seluruh perangkat Lembaga memahami fungsi dan tugas masing-masing.	10	0	3	0
c	Struktur Lembaga memadai dan sesuai kebutuhan	0	0	0	13
d	Struktur Lembaga dinamis dan tanggap terhadap perubahan	0	0	0	13
e	Hubungan antar-pengurus, pengelola, dan anggota dalam struktur Lembaga	0	0	0	13
		10x4=40	0	3x2=6	52x1=52

	BOBOT= (40+6+52) : (10+3+52)=98:65 = 1,508	D = KURANG			
Jawab	Secara tertulis belum ada struktur, Pengurus belum paham tentang struktur Sie Sosial dengan sebenarnya				
3. Manajemen Organisasi					
Pelaksanaan Rapat Pengurus Sie Sosial Tahunan					
a	Pelaksanaan Rapat	13	0	0	0
b	Pengambilan keputusan manajemen dilakukan secara partisipatif dan demokratis	13	0	0	0
c	Memiliki rencana pengembangan untuk jangka panjang (renstra) dan jangka pendek dan mudah dipahami	0	0	0	13
d	<i>Stakeholders</i> memberikan masukan dalam penyusunan rencana strategis	13	0	0	0
e	Rencana Kegiatan Tahunan dan strategi pencapaian	0	0	0	13
f	Rencana strategis disusun berdasarkan alokasi sumber daya yang tersedia	0	13	0	0
g	Rencana strategis sebagai dasar dalam melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi	13	0	0	0
		52x4=208	13x2=26	0	26x1=26
	BOBOT=(208+26+26) : (52+13+26)=260:91 =2,857	B = BAIK			
Jawab:	Hanya ide saja, belum tertuang dalam renstra dan rencana jangka pendek				
Prosedur Administrasi					
a	Sie Sosial memiliki SOP (standar operasional dan prosedur)	0	0	0	13
b	SOP disusun melibatkan seluruh perangkat Sie Sosial	0	0	0	13
c	SOP secara berkala dilakukan pembaharuan (<i>update</i>)	0	0	0	13
d	SOP mempertimbangkan masukan dari <i>stakeholders</i>	0	0	0	13
e	SOP dirancang dan diterapkan secara fleksibel	0	0	0	13
		0	0	0	65x1=65

Jawab:	Belum ada SOP				
Sistem Informasi dan Pelaporan					
a	Memiliki sistem atau mekanisme pelaporan yang jelas dan mudah diterapkan	0	0	0	13
b	Secara berkala membuat laporan kegiatan untuk kepentingan lembaga	0	0	0	13
c	Menindaklanjuti hasil kasus atau laporan secara berkala	0	0	13	0
d	Laporan dipublikasikan dan didesiminasikan kepada pihak pemberi dana	13	0	0	0
e	Format laporan disusun secara fleksibel dan merespon kebutuhan informasi pemberi dana	0	0	0	13
f	Memiliki sarana pendukung sistem informasi dan pelaporan yang memadai	0	0	0	13
g	Sistem dokumentasi disusun sesuai dengan prinsip-prinsip kearsipan	0	0	0	13
h	Memiliki Pendamping bagi penerima bantuan	13	0	0	0
i	Memiliki mekanisme pendampingan dan monev secara berkala	0	13	0	0
	Total	26x4=104	13x3=39	13x2=26	65x1=65
	BOBOT= (104+39+26+65) : (26+13+13+65)=234:117= 2	C = CUKUP			
Jawab	Tidak membuat pelaporan terstruktur dan Jelas, pendampingan dilakukan oleh Romo Sony secara lisan saja, dan saat ini baru dilakukan monev pendampingan dari Surabaya/UKDC, Nilai CUKUP				
4. Pengembangan SDM					
<i>Performance Appraisal</i> (Penilaian Kinerja) bagi Pengurus dan Peminjam					
a	Memiliki sistem penilaian kinerja yang tertulis	0	0	0	13
b	Secara berkala melaksanakan evaluasi kinerja				13
c	Pengurus, pengelola, dan staf menyusun <i>performance plan</i> (tahunan).				13
d	Pembimbingan dilakukan secara periodik oleh Pimpinan atau Penyelia berdasarkan <i>performance plan</i>				13
Jawab	Penilaian kinerja pada lembaga belum ada secara tertulis				
Pengembangan Kapasitas Staf dan Peminjam					

a	Perencanaan yang jelas tentang pengembangan profesionalisme personil Sie Sosial (pelatihan, kursus, dll)	0	0	0	13
b	Sie Sosial memiliki kemampuan profesional di bidangnya	0	0	0	13
c	Sie Sosial memiliki pemahaman tentang tujuan lembaga	0	0	0	13
d	Lembaga memfasilitasi pelatihan untuk peningkatan kualitas personil	0	0	0	13
e	Pelatihan yang diberikan sesuai dengan tugas	0	0	0	13
f	Kemudahan untuk menerapkan pengetahuan baru (hasil pelatihan)	0	0	0	13
g	Rencana pengembangan Sie Sosial disusun melibatkan seluruh perangkat organisasi	13	0	0	0
h	Ruang bagi personil Sie Sosial untuk berdialog	0	0	0	13
i	Pengurus dan pengelola mendukung kreativitas dan kinerja Sie Sosial	0	0	0	13
		13x4=52	0	0	156x1=156
	BOBOT= (52+156) : (13+ 156) =208: 169= 1,231	D = KURANG			
Jawab	Penagembangan kapasitas staf belum ada, baik perencanaan, kemampuan profesional, pemahaman tujuan lembaga, pemberian fasilitas pelatihan, tidak ada ruangan personil, belum adanya kreativitas Sie Sosial, yang ada hanya perangkat organisasi ikut dilibatkan dalam rencana pengembangan Sie Sosial berupa ide saja. Pengembangan SDM memperoleh nilai Kurang (=D)				
B.KEUANGAN					
1. Sistem dan Kebijakan Keuangan					
a	Proses peminjaman dan pelaporan keuangan mudah dikerjakan	13	0	0	0
b	Besar nilai pinjaman mengikuti kelayakan peminjam	5	0	0	8
2. Anggaran Keuangan					
a	Menyusun Rencana Anggaran penerimaan pinjaman PSE	0	0	0	13
b	Rencana anggaran disusun sesuai dengan kebutuhan proposal calon penerima pinjaman PSE	0	0	0	13
		18x4=72	0	0	34x1=34

	BOBOT=(72+34): (18+34) =106 : 52 = 2,038	C = CUKUP			
Jawab	<p>Proses peminjaman dan pelaporan mudah dikerjakan=100% , tetapi nilai pinjaman tidak seluruhnya berdasar kelayakan peminjam, karena 62% berdasarkan kenal saja, asal uang bisa dikembalikan, bahkan ada penerima yang kami anggap sangat mampu, artinya tidak layak menerima dana pinjaman PSE ini. Sebanyak 38% memang sudah sesuai aturan yang ada pada Sie Sosial. Tapi dalam hal ini kami selaku monev pendamping tidak mendapat data secara lengkap dari penerima pinjaman PSE.</p> <p>Dalam menyusun rencana anggaran tidak ada, dan tidak ada proposal dari peminjam. Sistem dan Kebijakan Keuangan memperoleh nilai</p>				
3. Audit Sie Sosial					
a	Sistem internal audit yang memadai	0	0	0	13
b	Pengadaan eksternal audit untuk mendukung sistem internal audit yang ada	0	0	13	0
c	Hasil audit digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja Sie Sosial	0	0	0	13
		0	0	13x2=26	26x1=26
	BOBOT= (26+26) : (13+ 26) = 54 : 39 =1,385	D = KURANG			
Jawab	Tidak ada Audit Sie Sosial				
4. Laporan Keuangan					
a	Sie Sosial membuat laporan keuangan tahunan sesuai dengan standar yang berlaku	0	0	0	13
b	Laporan keuangan merefleksikan akuntabilitas	0	0	0	13
c	Laporan keuangan diinformasikan dan didesiminasikan secara terbuka kepada pihak pemberi dana (PSE Keuskupan)	0	0	0	13
d	Laporan keuangan disiapkan dan di-review oleh pengurus dan pengelola PSE Keuskupan	0	0	0	13
e	Laporan keuangan Sie Sosial digunakan menjadi masukan bagi perencanaan dan pengambilan keputusan PSE Keuskupan	0	0	0	13
		0	0	0	65x1=65

	BOBOT= 65: 65 = 1	D = KURANG			
Jawab	Sie Sosial tidak membuat laporan keuangan secara standar, hanya berupa buku catatan menerima dan keluarnya dana PSE				
C. SARANA DAN PRASARANA					
a	Bangunan kantor yang memadai	0	0	0	13
b	Perlengkapan penunjang kegiatan Sie Sosial	0	0	0	13
c	Lahan atau area yang memadai untuk kegiatan Sie Sosial	0	0	0	13
		0	0	0	39x1=39
	BOBOT= 39 :39 = 1	D = KURANG			
Jawab	Sarana dan prasarana dalam hal ini bangunan kantor maupun lahan/area tidak ada, dikerjakan di paroki saja, tidak ada perlengkapan penunjang kegiatan sie Sosial				
D. USAHA LEMBAGA					
1. Permodalan					
a	Kemudahan dalam meperoleh dana usaha dari pihak Paroki	13	0	0	0
b	Kemampuan memenuhi standar atau kriteria pembiayaan	13	0	0	0
		26x4=104	0	0	0
	BOBOT= 104 : 26 = 4	A = BAIK SEKALI			
Jawab	Menurut Sie Sosial mudah dalam memperoleh dana dan pembiayaan dari pihak paroki, tidak butuh waktu yang lama, karena kegiatan ini memang dari Keuskupan Surabaya				
E. PELAYANAN					
1. Pelayanan kepada penerima pinjaman PSE					
Pendidikan penerima pinjaman					
a	Bermanfaat untuk meningkatkan terhadap keadaan dan keterampilan usaha penerima pinjaman PSE	13	0	0	0
b	Kesiapan Sie Sosial untuk memberikan kontribusi modal dan keterlibatan dalam peningkatan usaha penerima pinjaman PSE	13	0	0	0

Jawab	Pelayanan dalam hal pendidikan penerima pinjaman sangat bermanfaat terhadap keadaan dan keterampilan usaha penerima, serta kesiapan Sie Sosial yang sangat siap memberikan kontribusi modal dan keterlibatan dalam peningkatan usaha peminjam.				
Akses Informasi					
a	Dapat diakses oleh Sie Sosial dalam waktu yang singkat	0	0	13	0
b	Informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	10	0	0	3
c	Akses informasi yang ada dapat meningkatkan kapasitas penerima pinjaman PSE	13	0	0	0
Jawab	Akses informasi tidak dapat diakses dalam waktu singkat, karena harus mencari siapa yang akan diberi pinjaman yang bisa mengembalikan tepat waktu. Dalam hal informasi akurat dan dipertanggungjawabkan, yang menyatakan sangat setuju 77%, sedang 33% mendapat informasi bahwa dana PSE tidak perlu dikembalikan pada pusat, dan akan dikelola oleh paroki. Informasi sangat dapat meningkatkan kapasitas penerima pinjaman=100%				
Kualitas Pelayanan Sie Sosial					
a	Pengurus dan pengelola berlaku profesional dan adil terhadap semua penerima pinjaman PSE	13	0	0	0
b	Sie Sosial memberikan kemudahan dalam pelayanan (birokrasi)	13	0	0	0
c	Memberikan respon proaktif kepada penerima pinjaman	13	0	0	0
d	Prosedur dan aturan peminjaman pinjaman PSE jelas dan benar	13	0	0	0
Jawab	Kualitas layanan sudah sangat baik, karena dikerjakan sangat sederhana dan tidak rumit, tidak ada sanksi.				
	Pelayanan kepada penerima pinjaman PSE	$101 \times 4 = 404$	0	$13 \times 2 = 26$	$3 \times 1 = 3$
	$BOBOT = (404 + 26 + 3) : (101 + 13 + 3) = 433 : 117 = 3,701$	A = BAIK SEKALI			
	Pelayanan kepada penerima pinjaman PSE memperoleh nilai Baik Sekali				

F . PARTISIPASI PEMINJAM					
1. Partisipasi Modal					
a	Kepatuhan para peminjam dalam membayar angsuran per periode	13	0	0	0
b	Lancar dalam membayar angsuran	10	3	0	0
c	Lancar dalam membayar bunga pinjaman	0	0	0	13
2. Transaksi Usaha					
a	Partisipasi peminjam dalam memanfaatkan fasilitas lembaga	13			
b	Usaha yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peminjam	13			
c	Tingkat pengembalian pinjaman oleh peminjam	13			
3. Loyalitas					
a	Kepatuhan peminjam dalam mengikuti mekanisme dan prosedur kelembagaan	13			
b	Terlibat aktif dalam pengembangan usaha lembaga	13			
		104x4=416	3x3=9	0	13x1=13
	BOBOT= (416+9+13) : (104+3+13) = 438 : 120= 3,65	A = BAIK SEKALI			
Jawab	Dalam hal partisipasi peminjam yaitu pembayaran angsuran sangat baik dan lancar; Transaksi usaha juga dinilai sangat baik, begitu pula dengan loyalitas juga sangat baik. Disimpulkan Partisipasi Peminjam memperoleh nilai Baik Sekali				
G. JARINGAN KERJA					
1. Hubungan dengan Masyarakat					
a	Lembaga dipercaya oleh masyarakat	13	0	0	0
b	Lembaga dipandang profesional dan berharga bagi masyarakat	13	0	0	0
c	Menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak dalam masyarakat melalui prinsip-prinsip kemitraan	13	0	0	0

2. Kerjasama dengan Pemerintah					
a	Menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah lokal dan nasional	0	13	0	0
b	Dipercaya untuk menjalankan program bersama pemerintah	0	0	0	13
c	Memberikan masukan terhadap rencana kegiatan tahunan pemerintah	0	0	0	13
3. Kerjasama antar-Paroki					
a	Menjalin kerjasama (<i>network</i>) dengan Paroki lain dalam meningkatkan kapasitas usaha	13	0	0	0
b	Memberikan masukan terhadap rencana pengembangan jaringan usaha lembaga	13	0	0	0
4. Kerjasama dengan Lembaga Donor					
a	Menjalin kerjasama dengan lembaga donor baik nasional maupun internasional	0	0	0	13
b	Memiliki kredibilitas di mata lembaga donor	0	0	0	13
c	Memiliki kapasitas untuk berdialog dan bernegosiasi dengan lembaga donor	0	0	0	13
5. Kerjasama dengan Sektor Swasta					
a	Menjalin kerjasama yang baik dengan sektor swasta (pengusaha)	0	0	0	13
b	Dipercaya untuk mengembangkan program ekonomi dengan sektor swasta	0	0	0	13
c	Memiliki kapasitas untuk berhubungan dengan sektor swasta	0	0	0	13
		$65 \times 4 = 260$	$13 \times 3 = 39$	0	$104 \times 1 = 104$
	BOBOT= $(260+39+104) : (65+13+104) = 403 : 182 = 2,214$	C = CUKUP			
Jawab	Jaringan kerja dalam hal hubungan masyarakat sangat baik; kerjasama dengan pemerintah lokal yang dimaksud adalah RT dan RW, pemerintah nasional belum ada kerjasama; kerjasama antar-paroki sangat baik, sedangkan kerjasama dengan lembaga donor belum ada, begitu pula kerjasama dengan sektor swasta belum ada. Jaringan kerja memperoleh nilai CUKUP (=C)				

Hasil Tabulasi Pengukuran Kapasitas SIE SOSIAL – PSE Mengindikasikan Kapasitas kelembagaan, dan aspek yang perlu ditingkatkan.

Aspek Penilaian	Tingkat Kapasitas				Total	Rata-rata Skor	Kesimpulan
	A	B	C	D			
Kelembagaan		2,857	2,000 2,000	1,508 1,231	9,596	1,599	CUKUP
Keuangan		0	2,038	1,385 1,000	4,423	1,474	KURANG
Sarana dan Prasarana		0	0	1,000	1,000	1,000	KURANG
Usaha Lembaga	4,000	0	0	0	4,000	4,000	BAIK SEKALI
Pelayanan	3,701	0	0	0	3,701	3,701	BAIK SEKALI
Partisipasi Peminjam	3,65	0	0	0	3,65	3,65	BAIK SEKALI
Jaringan Kerja	0	0	2,214	0	2,214	2,214	CUKUP
JUMLAH=						17,638	
Rata-Rata= 17,638 : 7 =						2,520	
KESIMPULAN						BAIK	

A = $3,5 < x \leq 4,0$ (Baik Sekali); B = $2,5 > x \leq 3,5$ (Baik); C = $1,5 \geq x \leq 2,5$ (Cukup); D = $1,0 < x < 1,5$ (Kurang)

Masukan

Masukan yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. yang dibutuhkan pengguna dana saat ini adalah bagaimana cara memasarkan produk mereka;
2. yang dibutuhkan saat ini bagi petani cabe adalah pendampingan yang berupa cara penanaman dan penanggulangan hama oleh Dinas Pertanian;
3. bagi pedagang, yang dibutuhkan saat ini adalah *supplier* yang dapat memenuhi kebutuhan pedagang kecil dengan harga murah, sehingga tidak perlu mencari di tempat lain yang lokasinya terpisah-pisah;
4. prosedur dana: Ketua Lingkungan Seksi Sosial Paroki Ketua Bidang PSE.

Simpulan

Dari hasil wawancara langsung dengan pengguna dana PSE, diperoleh hasil:

1. Pengelola dana PSE di tiap daerah memiliki rasa khawatir jika dana PSE yang dipinjamkan tidak bisa dikembalikan

oleh masyarakat, sehingga dana yang ada tersebut dipinjamkan pada masyarakat yang dianggap oleh pengelola dapat dipercaya, dan mampu mengembalikan dana pinjaman PSE tersebut pada waktunya.

2. Dana pinjaman PSE dipinjam oleh orang-orang yang sama terus, setidaknya oleh keluarganya secara bergantian.
3. Tidak ada antrian pinjaman, siapa saja bisa meminjam dana.
4. Dana PSE diharapkan akan dialirkan dan dipinjamkan pada masyarakat yang memiliki usaha kecil dan petani, tetapi secara riilnya dipinjam oleh masyarakat yang memiliki usaha cukup besar seperti pedagang, usaha mebel, pemilik sapi dan kambing walaupun ada beberapa yang memang petani.
5. Pinjaman bersifat pribadi atau perorangan bukan kelompok.
6. Dana yang bergulir di masyarakat tersebut dikelola di paroki dan tidak dikembalikan ke Keuskupan Surabaya.
7. Belum ada SOP yang jelas.

Saran

Saran yang diberikan peneliti dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Penilaian Kapasitas Pinjaman Usaha Mikro belum dijalankan sesuai SOP yang ada, dikarenakan pengurus yang juga memiliki keterbatasan waktu untuk survei lapangan.
2. Peminjaman tidak seharusnya oleh orang-orang yang sama terus, harus ada orang yang khusus ditunjuk atau dipekerjakan sebagai bagian evaluasi penilaian.
3. Bagi masyarakat yang dianggap sudah mampu secara ekonomi, seharusnya tidak diijinkan untuk menerima dana pinjaman PSE, lebih baik dipinjamkan pada masyarakat yang memiliki usaha mikro dan petani kecil.
4. Dana PSE diharapkan akan dialirkan dan dipinjamkan pada masyarakat yang memiliki usaha kecil dan petani, sesuai tujuan semula.
5. Dana PSE sebaiknya dialirkan ke kelompok seperti kelompok tani, bukan perseorangan, sehingga tiap kelompok mempunyai penanggung jawab.
6. Dana yang bergulir di masyarakat tersebut dikelola di paroki dan sebaiknya tetap dikembalikan kepada Keuskupan Surabaya, sehingga Keuskupan dapat memantau keefektifan dana tersebut, dan diharapkan adanya evaluasi berkelanjutan.
7. Harus memiliki SOP pada tiap paroki, agar memiliki kejelasan tentang siapa saja yang bisa meminjam, tentunya diarahkan pada mereka yang memang membutuhkan, bukan kepada siapa nanti yang bisa mengembalikan dana pinjaman tersebut.

Daftar Pustaka

- Adiningsih, S. 2001. Regulasi dalam Revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. <http://jurnal.unikom.ac.id/vol4/art7.html>, diakses tanggal 13 Juni 2017.
- Ayyagari, Meghana, Thorsten Beck and Asli Demirgüç-Kunt. 2003. Small and Medium Enterprises Across The Globe: A New Database, Working Paper 3127, *World Bank Publication*.
- Berry, Albert. 2007. *The Importance of SMEs in The Economy*. International Tax Dialogue Global Conference on Taxation of SME, Buenos Aires, Argentina.
- Hafsah, M.J. 2004. Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), *Infokop No. 25 Tahun XX*, pp 40-44
- Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2004. Dinamika Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Analisis Konsentrasi Regional UKM di Indonesia 1999-2001. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 9, Nomor 2 Desember 2004*, Halaman 143-164. <http://journal.uui.ac.id/index.php/JEP/article/view/617/543> diunduh tanggal 30 April 2012.
- Tambunan, Tulus T.H. 2009. *UMKM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Urata Shujiro. 2000. Policy Recommendation: Outline of tentative Policy Recommendation for SME Promotion in Indonesia. *Publikasi JICA 17 Mei 2007*.
- Badan Pusat Statistik/BPS

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, <http://diskopumkm.jatimprov.go.id/view-media.php?pages=content&id=57&bidang=>

Konpernas Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi KWI XXII, 2011

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro)